

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya inovasi digital telah merevolusi berbagai sektor kehidupan modern, tidak terkecuali pada aspek kewarganegaraan. Jika sebelumnya makna kewarganegaraan dipandang sekadar keterlibatan masyarakat secara tradisional dalam tatanan kenegaraan, namun kini mengalami perluasan makna menjadi kewarganegaraan digital (digital citizenship). Penciptaan sebuah teknologi merupakan bagian dari kerja akan dan fikiran manusia untuk manusia itu sendiri, sebagaimana sebuah teknologi tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan yang manusia miliki sehingga dapat menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi manusia (Wahyuni Firli Fangestu & Syahrizal, 2023). Hal ini pun juga berdampak terhadap perkembangan penggunaan teknologi dalam proses belajar dan mengajar. Sebagai tenaga pendidik guru dituntut untuk mengikuti alur perkembangan zaman salah satunya di bidang teknologi digital. Pada kasus ini berbagai inovasi pun harus di ciptakan serta dikembangkan oleh guru atau tenaga pendidik guna memudahkan penyampaian dan praktik yang bersangkutan dengan teknologi pada proses mengajar.

Dalam lanskap pendidikan modern yang didorong oleh kemajuan teknologi, berbagai inovasi dapat diimplementasikan oleh pendidik untuk memperkuat proses pengajaran sekaligus mengoptimalkan hasil belajar siswa. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan perangkat digital. Melalui integrasi sistem manajemen pembelajaran, aplikasi edukasi, serta platform kolaboratif daring, guru mampu

memperkaya pengalaman belajar sekaligus meningkatkan keterlibatan peserta didik. Selain itu, strategi *flipped classroom* patut dipertimbangkan sebagai pendekatan alternatif. Dengan meminta siswa mengakses materi pembelajaran berupa video atau rekaman kuliah sebelum sesi tatap muka, waktu di kelas dapat difokuskan pada aktivitas diskusi yang lebih interaktif dan pembelajaran yang bersifat personal. Tak kalah penting, pemanfaatan teknologi *virtual reality* dan *augmented reality* juga dapat menawarkan pengalaman belajar yang impresif, sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak maupun gagasan yang rumit. Dengan mengadopsi metode-metode inovatif seperti ini, guru tidak hanya mampu meningkatkan partisipasi siswa, tetapi juga dapat mendorong capaian akademik yang lebih optimal serta membekali siswa dengan kompetensi yang relevan di era digital. Oleh sebab itu, sangat krusial bagi para pendidik untuk senantiasa mengeksplorasi pendekatan-pendekatan baru dalam pengajaran mereka agar mampu merespons kebutuhan belajar siswa yang terus berubah seiring perkembangan zaman (Oktariani, Nadya, 2023).

Kewarganegaraan digital mencakup partisipasi aktif warga dalam ruang digital secara bertanggung jawab, etis, serta kritis. Dengan berbagai aplikasi yang dapat diakses seperti Youtube, Instagram, Twitter (X), Facebook, Google, WhatsApp, TikTok serta berbagai aplikasi lainnya dapat memudahkan pengguna internet untuk mengakses berbagai informasi serta konten yang diinginkan. Namun hal tersebut tak luput dari berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh pengguna internet. Di tengah laju inovasi teknologi yang semakin maju, masyarakat kini dihadapkan pada berbagai persoalan yang semakin beragam dan kompleks, termasuk pergesekan ideologi, isu seputar stabilitas nasional, dominasi budaya Barat, hingga

potensi terkikisnya identitas nasional (Akbar et al., 2024). Dalam Jurnal ilmiah dengan judul Implementasi Digital Citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ryand Daddy Setyawan, Muhammad Hijran, dan Rozi, kewarganegaraan digital merupakan konsep yang dapat digunakan dalam memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi digital. Kewarganegaraan digital memiliki keterkaitan dengan literasi digital, sehingga Gen Z dapat memilah informasi yang benar dan bertanggungjawab. Pada perkembangan zaman sekarang, kemampuan memilah informasi yang benar dan valid itu penting agar tidak menimbulkan misinformasi atau konflik didalam kehidupan bermasyarakat (Daddy Setyawan & Hijran, 2023). Pada era digital saat ini berbagai tantangan digital dapat ditemui bahkan dapat dirasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh tantangan pada era digital saat ini yaitu disinformasi.

Disinformasi dapat dengan mudah disebarkan melalui berbagai platform di internet sehingga dapat mempengaruhi berbagai opini publik serta memecah belah masyarakat. Fenomena disinformasi semakin marak di era digital saat ini hingga memunculkan tantangan baru dalam pembentukan karakter kewarganegaraan pada generasi muda. Salah satu kasus dari disinformasi yang cukup memberikan banyak dampak negatif terhadap masyarakat terjadi pada saat era pademi *Covid-19*. Disinformasi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ilmuwan dalam upaya mengatasi Covid-19, sehingga turut menghambat proses penanggulangan pandemi. Terdapat tiga tipe utama disinformasi yang berkembang selama pandemi Covid-19. Jenis pertama adalah disinformasi di bidang kesehatan, kedua berupa teori konspirasi, dan ketiga

berkaitan dengan praktik penipuan. Disinformasi kesehatan, misalnya, seringkali memuat klaim penggunaan obat tertentu untuk Covid-19 tanpa validasi ilmiah. Bagi pembuat kebijakan, penting memahami hakikat disinformasi serta langkah untuk mengatasinya. Dalam merespons pandemi global, disinformasi berpengaruh besar terhadap respons negara dengan meruntuhkan kepercayaan, memunculkan kecemasan, serta kadang mendorong perilaku berbahaya di masyarakat (Setyawan et al., 2021). Disinformasi dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, bahkan bertindak warga digital, terkhusus peserta didik yang berada dalam masa pembentukan jati diri serta identitas. Oleh karena itu, pendidikan digital memiliki peran sentral (pusat) dalam membentuk kesadaran dan etika digital sebagai bagian penting dari transformasi kewarganegaraan digital.

Banyaknya pengguna internet di Indonesia juga menjadi tantangan yang berarti bagi keberlangsungan digital citizenship. Berdasarkan data dari Indonesia.go.id pada Kamis, 27 Februari 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta orang, yang merepresentasikan 79,5 persen dari keseluruhan populasi. Dengan angka tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pemakai internet terbanyak secara global. Menariknya, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia sudah memanfaatkan telepon seluler, sedangkan 35,57 persen lainnya telah mengakses internet. Jika dikaji menurut kelompok usia, terdapat 5,88 persen anak di bawah satu tahun yang sudah menggunakan perangkat gawai, dan 4,33 persen anak pada rentang usia yang sama telah mengakses internet sepanjang tahun 2024 (Wisnubroto, 2025). Dengan banyaknya jumlah pengguna internet terkhusus pada pelajar, pendidikan etika digital sangat dibutuhkan guna mendoktrin

agar pengguna tidak semena-mena dalam menggunakan internet serta sebagai pondasi dasar dalam berselancar di dunia maya.

SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kota Batu yang berlokasi di Jalan Welirang, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu yang berada dalam lingkungan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, belum terdapat kajian mendalam terkait bagaimana lembaga ini menginternalisasikan nilai-nilai etika digital melalui proses pendidikan etika digital di tengah tantangan disinformasi. Penelitian kali ini berupaya menjawab kebutuhan terkait dengan fokus terhadap proses transformasi kewarganegaraan digital melalui pendekatan pendidikan etika digital. Penelitian kali ini berfokus pada bagaimana proses adaptasi dan inovasi yang responsive dari SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu terhadap perkembangan teknologi dan transformasi kewarganegaraan digital melalui proses pendidikan etika digital.

B. Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, studi ini mempunyai perumusan terhadap permasalahan seperti ini:

1. Bagaimana wujud transformasi kewarganegaraan digital di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu?
2. Bagaimana implementasi pendidikan etika digital dalam menghadapi tantangan disinformasi di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu?
3. Apa sajakah faktor yang mampu menghambat dan mendukung transformasi kewarganegaraan digital melalui pendidikan etika digital.

C. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan seperti berikut ini:

1. Mendeskripsikan wujud transformasi kewarganegaraan digital di SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu.
2. Menganalisis implementasi pendidikan etika digital dalam menghadapi tantangan disinformasi.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses transformasi kewarganegaraan digital melalui pendidikan etika digital.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya, studi ini mampu memberikan sejumlah manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Menyumbang kontribusi terhadap proses kajian kewarganegaraan digital dan pendidikan etika digital, terutama pada konteks pendidikan menengah di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Sekolah;** Memberikan masukan dalam merancang kebijakan serta strategi pendidikan etika digital yang lebih efektif
- b. **Bagi Guru:** Menjadi referensi dalam penguatan kompetensi guru dalam membimbing peserta didik menjadi warga digital yang

bertanggung jawab serta paham akan norma dan nilai menjadi warga digital pada peserta didik

- c. **Bagi Peneliti Lain:** Menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konteks penelitian saat ini (kewarganegaraan digital dan literasi digital).

E. Batasan Istilah

Guna meminimalisir dan mencegah adanya kesalahan dalam pemahaman judul kajian ini, maka peneliti wajib untuk mengungkapkan mengenai judul penelitiannya, yakni “Transformasi Kewarganegaraan Digital Melalui Pendidikan Etika Digital Di Era Disinformasi Di Smp Muhammadiyah 8 Kota Batu: Studi Kasus”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut sebagai berikut:

1. Transformasi

Transformasi merupakan sebuah proses struktur, bentuk, sifat serta kondisi dari suatu objek atau sistem yang menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Konsep ini digunakan dalam berbagai bidang dengan makna tertentu dan akan selalu berkaitan dengan sebuah perubahan yang mendasar dari satu kondisi sebelumnya ke kondisi yang terbaru.

Secara ringkas, istilah transformasi kerap dikaitkan dengan makna perubahan. Perubahan sendiri merupakan bagian dari ketentuan Tuhan dan

menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Dinamika lingkungan pendidikan yang semakin kompetitif, ditambah perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus, menuntut lembaga pendidikan untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan agar tetap eksis dan relevan (Nasukah & Winarti, 2021).

2. Kewarganegaraan Digital

Aturan penggunaan teknologi yang benar dan bertanggung jawab yang memberikan panduan kepada siswa tentang cara berperilaku di dunia daring dalam kehidupan pribadi maupun akademik sebagai warga negara dikenal dengan istilah kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) (Gulcan Ozturk, 2021). Secara sederhana kewarganegaraan digital merupakan segala bentuk aturan atau pedoman guna menggunakan teknologi dengan baik di dunia maya maupun dunia nyata dengan benar, bertanggung jawab, serta memahami hak dan kewajiban serta dijadikan pedoman hidup dalam berdigitalisasi.

Konsep kewarganegaraan digital juga telah banyak dibentangkan dalam berbagai bidang penyelidikan literasi digital. Salah satu konsep yang mengkhhususkan kepentingan literasi digital juga terangkum dalam Kerangka Kerja Kecerdasan Digital (DQ). Kerangka Kerja DQ ini terbina hasil daripada 25 rujukan mengenai bidang literasi media digital pelbagai negara (Maliki et al., 2023).

3. Pendidikan Etika Digital

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang bermakna kebiasaan. Secara konseptual, etika merujuk pada seperangkat prinsip yang berhubungan dengan norma, moral, serta penilaian tentang benar dan salah dalam kaitannya dengan hak maupun kewajiban individu dalam suatu kelompok atau masyarakat (Syahda et al., 2024). Etika merupakan perilaku manusia dalam menentukan keputusan yang dianggap baik maupun buruk dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan. Selain itu, etika juga menekankan pentingnya penggunaan akal sehat dan objektivitas untuk menilai apakah suatu perilaku terhadap orang lain dapat dikatakan benar atau salah (Aprilia, 2022).

Etika digital merupakan kompetensi yang perlu disadari, diperhatikan, dan dikembangkan oleh individu dalam menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memanfaatkannya secara bijak. Selain itu dalam menggunakan internet, peserta didik juga dituntut untuk melakukan refleksi terhadap perilaku sopan santun dalam menggunakan teknologi digital serta mampu mengamalkan etika digital (Ainia & Mada, 2024).

Kesadaran etika digital di Indonesia cenderung rendah. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan menggunakan berbagai aplikasi media sosial, masih banyak yang belum memahami

pentingnya etika digital dan cara bertindak etis saat daring. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran etika digital di Indonesia antara lain:

- a. Kurangnya pendidikan tentang etika digital: Di Indonesia, terdapat kurangnya program pendidikan yang membahas etika digital, seperti: hak asasi manusia daring, hak cipta, dan privasi.
- b. Kurangnya pemahaman tentang dampak negative tindakan tidak etis: Banyak orang tidak memahami bahwa tindakan tidak etis secara daring dapat berdampak serius bagi orang lain, seperti menyebabkan stress, depresi, atau bahkan bunuh diri.
- c. Sanksi rendah terhadap tindakan tidak etis: Di Indonesia, sanksi terhadap perilaku tidak etis di internet masih relative rendah. Hal ini dapat membuat orang merasa tidak ada resiko signifikan untuk melakukan tindakan tidak etis di internet.

Pancasila merupakan sumber filsafat dan pedoman praksis dalam kehidupan beretika di masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam perspektif teori kesepakatan masyarakat, Pancasila merupakan hasil kesepakatan yang dipresentasikan oleh para founding father dalam membangun Indonesia yang merdeka (Yusuf & Wibowo, 2024).

4. Disinformasi

Disinformasi merupakan suatu tindakan penyebaran informasi yang tidak tepat atau salah dan dengan sengaja menyesatkan guna menipu,

memanipulasi, ataupun membingungkan publik untuk mencapai suatu keuntungan tertentu baik politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Pada era digitalisasi sekarang disinformasi dapat dengan mudah disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial maupun berbagai aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Deepfake AI serta berbagai aplikasi lainnya. Hal tersebut tentu saja dapat memberikan berbagai dampak buruk bagi masyarakat dalam aspek kehidupan.

Dalam menghadapi tantangan ini, berpikir kritis menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menilai dan menerima informasi baik dari media sosial atau dari perorangan. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat mudah terpengaruh hoaks dan kesulitan membedakan informasi benar dan palsu (Bangsa & Barat, 2025).

Di Indonesia, ancaman hoaks dan disinformasi semakin terlihat nyata dalam konteks politik, terutama selama pemilu dan pilkada. Sebagai contoh, bahwa selama Pemilu 2019, terdapat lonjakan penyebaran berita palsu dan narasi disinformasi yang dirancang untuk memecah belah masyarakat (Sarjito, 2024).